

PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Muhammad Dwi Nurfaisal ^{1*}, Imron Wasi ²

^{1,2}Universitas Pamulang

Jln. Raya Jakarta KM 5 No. 6, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang

*E-mail: dosen03014@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran atas pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), dengan fokus pada siswa SMK Negeri 1 Kota Serang. Pendidikan politik di sekolah diharapkan dapat membekali pemilih pemula dengan pemahaman yang lebih baik terkait proses pemilu, hak pilih, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa tentang Pemilu, meningkatkan kesadaran politik mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu. Pendidikan politik di sekolah terbukti menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang lebih terlibat dalam kehidupan demokrasi dan berperan aktif dalam Pemilu.

Kata Kunci : Pendidikan Politik; Pemilih Pemula, Pemilu

ABSTRACT

This community service activity aims to provide learning on the importance of political education for new voters in the implementation of the General Election (Pemilu), with a focus on students of SMK Negeri 1 Kota Serang. Political education in schools is expected to provide new voters with a better understanding of the election process, voting rights, and the importance of participation in democracy. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that political education has a significant influence on students' understanding of elections, increasing their political awareness, and encouraging active participation in the election process. Political education in schools has proven to be a strategic step in forming a young generation that is more involved in democratic life and plays an active role in elections.

Keywords: Political Education; New Voters, Election

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan publik. Keberhasilan suatu pemilu yang demokratis dan berintegritas sangat bergantung pada partisipasi aktif dan pemahaman yang memadai dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilu. Mereka umumnya terdiri dari generasi muda yang baru memasuki usia pemilih, sehingga memiliki karakteristik unik dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku politik (Simamora et al., 2024).

Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi suatu kebutuhan yang mendesak mengingat rendahnya tingkat literasi politik di kalangan generasi muda.

Literasi politik merupakan kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi proses politik yang berlangsung, serta menggunakan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik (Nurfaisal & Sari, 2025). Rendahnya literasi politik dapat mengakibatkan pemilih pemula menjadi rentan terhadap manipulasi politik, seperti politik uang dan propaganda yang menyesatkan. Selain itu, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih juga dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses pemilihan umum (Indrawan & Yuliandri, 2023).

Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kebijakan pendidikan formal cenderung kurang memberikan ruang bagi pengajaran politik yang mendalam, sehingga banyak pemilih pemula yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam pemilu. Fenomena ini memerlukan intervensi yang tepat melalui program-program edukasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pemilih pemula dalam memahami proses demokrasi dan hak-hak politik mereka (Indrawan & Yuliandri, 2023).

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Pentingnya Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum" dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik yang komprehensif bagi pemilih pemula, khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Serang. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi, proses pemilihan umum, serta hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pemilih. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran politik yang sehat, bertanggung jawab, dan kritis di kalangan pemilih pemula sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia (Hadi Karyono et al., 2023).

Pelaksanaan program ini meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi seminar, diskusi kelompok terarah *Focus Group Discussion* (FGD), serta penyusunan dan penyebaran materi edukatif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Seminar dan FGD dirancang untuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya partisipasi politik yang kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, penyusunan materi edukatif yang disebarluaskan melalui media digital diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pemilih pemula secara efektif. Dengan demikian, pendidikan politik bagi pemilih pemula diharapkan dapat menjadi upaya yang efektif dalam menciptakan pemilih yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik mereka (Elen Pitria et al., 2023).

Pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula seharusnya difokuskan pada peningkatan kemampuan analitis dan kemampuan berpikir kritis, sehingga generasi muda dapat menjadi pemilih yang bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang manipulatif. Selain itu, pendidikan politik juga harus mencakup pemahaman tentang pentingnya integritas dalam proses pemilu,

termasuk penolakan terhadap politik uang dan kampanye hitam (Almuntasor et al., 2022).

Pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula perlu dikemas secara menarik dan sesuai dengan karakteristik generasi muda yang cenderung lebih tertarik dengan media digital. Penggunaan media sosial, video edukatif, dan aplikasi interaktif dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan materi pendidikan politik dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik bagi mereka (Azirah, 2019).

Dalam konteks ini, program PkM yang dilaksanakan bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan yang inovatif dalam menyampaikan materi pendidikan politik. Penggunaan metode diskusi interaktif, seminar, dan penyebaran informasi melalui platform digital diharapkan dapat meningkatkan literasi politik pemilih pemula dengan lebih efektif dan menyeluruh (Anshori & Izharsyah, 2023).

Selanjutnya, pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai proses politik, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilu (Fathurokhman, 2022). Partisipasi politik yang berkualitas membutuhkan pemilih yang memahami hak-haknya, mampu mengkritisi informasi yang diterima, serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan politik yang tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang berkembang (Hadi Karyono et al., 2023).

Literasi politik yang baik dapat menciptakan generasi muda yang lebih mandiri dan kritis dalam menanggapi berbagai fenomena politik yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula perlu terus didorong melalui berbagai pendekatan yang kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi yang dapat menjangkau lebih banyak audiens (Fatmarina et al., 2019).

Secara keseluruhan, pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan bagian integral dari upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pemilih yang memiliki literasi politik yang baik, proses pemilihan umum diharapkan dapat berlangsung secara lebih berkualitas, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

METODE

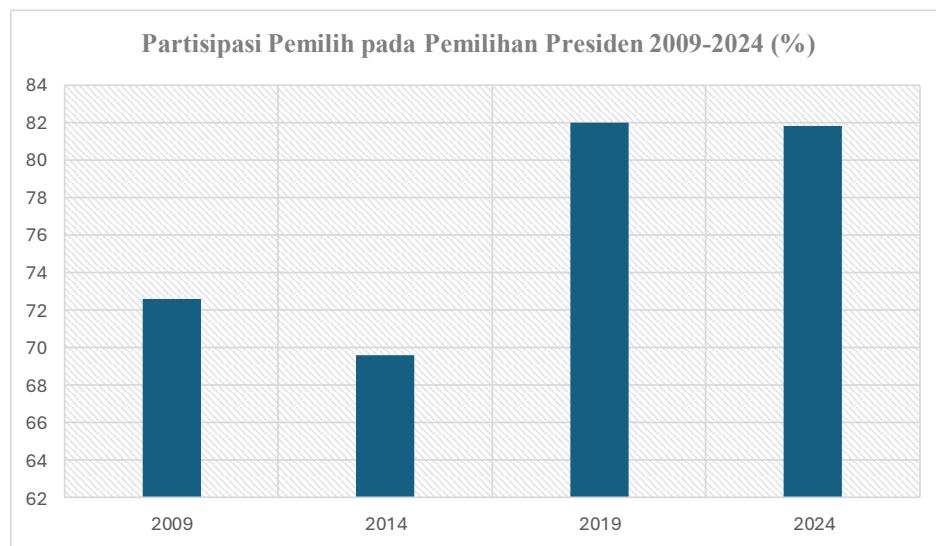
Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pembelajaran partisipatif, yang melibatkan penyampaian teori, diskusi interaktif, simulasi pemilu, dan evaluasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemilih pemula tentang pentingnya pendidikan politik dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mendorong keterlibatan aktif dari peserta didik di SMKN Negeri 1 Kota Serang.

Target kegiatan PKM ini adalah siswa-siswi kelas XII di SMKN Negeri 1 Kota Serang yang telah memenuhi syarat usia sebagai pemilih pemula. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari siswa-siswi kelas XII dan beberapa perwakilan guru pendamping. Materi yang diberikan meliputi pentingnya partisipasi politik, hak dan kewajiban pemilih, prosedur pemilu, serta peran pemuda dalam menjaga demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Partai Politik terhadap Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum

Partai politik memiliki peranan yang sangat inheren dalam proses demokrasi di Indonesia, salah satu yang paling kentara ialah terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Keberhasilan partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula maupun pemilih pada umumnya tentu memiliki garis equivalen terhadap meningkatnya partisipasi politik para pemilih. Sebagaimana yang telah terekam pada partisipasi pemilih melalui Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang telah dimulai pada 2009-2024. Hasilnya, partisipasi politik pemilih dalam arena politik Pemilihan Presiden mengalami fluktuasi, terutama terjadi pada tahun 2014 sebesar 69,58 persen. Sebelumnya, pada Pemilihan Presiden 2009, tingkat partisipasi politik sebesar 72,55 persen. Setelah itu, indeks partisipasi politik selalu mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2019 sebesar 81,97 persen, dan pada Pemilihan Presiden 2024 mengalami penurunan, hanya mencapai 81,78 persen.

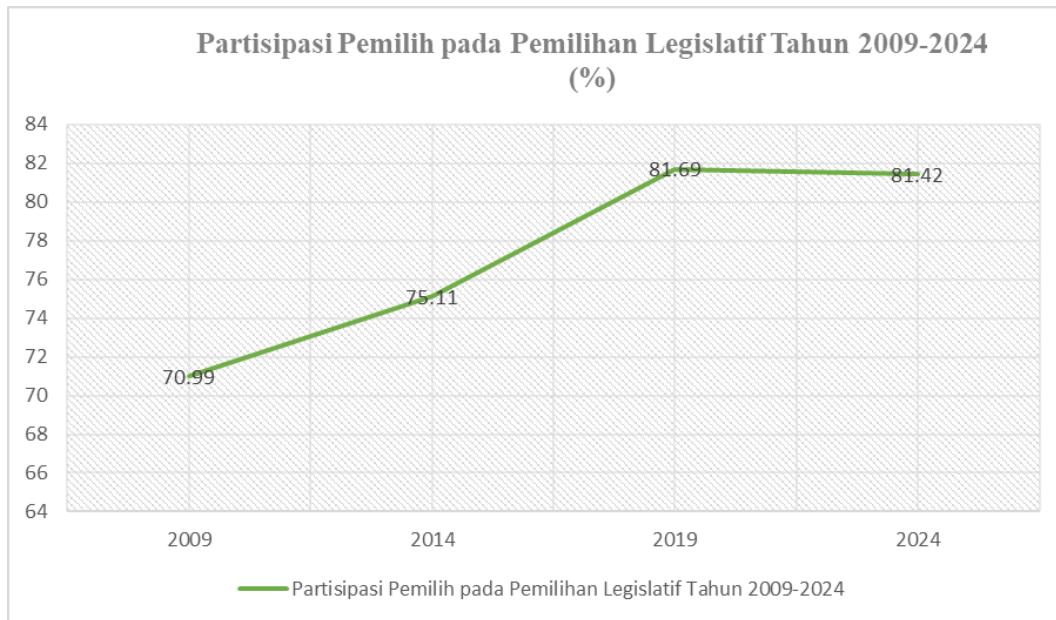


Sumber: (MEGA HENDARTO, 2024a).

Tingkat partisipasi politik yang mengalami fluktuasi tersebut tentu dilandasi peranan partai politik dan penyelenggara pemilu dalam memberikan edukasi kepada publik, terutama melalui proses sosialisasi maupun kampanye yang dilakukan oleh partai politik maupun kontestan di arena politik. Pada Pemilihan Presiden 2024, tingkat partisipasi politik pemilih mengalami penurunan dari Pemilihan Presiden 2019. Hal ini ditengarai karena belum maksimalnya pemberian pendidikan politik yang diberikan partai politik maupun penyelenggara pemilu, termasuk pemilu yang dilakukan secara serentak yang membuat sebagian pemilih turut mengalami kebingungan karena harus memilih para kandidat yang tidak sedikit. Kendati demikian, masyarakat sipil tidak absen dalam panggung politik tersebut, melainkan mengadakan berbagai kegiatan untuk mengedukasi publik melalui forum-forum diskusi.

Namun, tingkat partisipasi politik terhadap Pemilihan Legislatif justru mengalami peningkatan. Dalam bahasa lain, meskipun pemilu dilakukan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, tren partisipasi politik Pemilihan Legislatif cenderung meningkat. Hal tersebut karena kandidat yang berlaga dalam arena politik legislatif lebih dominan, terdiri atas kandidat yang berasal dari seluruh peserta pemilu, terutama partai politik yang mengusung kandidat-kandidat tertentu sekaligus memiliki pendekatan emosional terhadap pemilih, terlebih didukung oleh kekuatan tim sukses yang secara eksklusif dekat dengan para pemilih. Artinya, jangkauan dalam arena politik legislatif cenderung luas, jika dibandingkan dengan pemilihan presiden. Oleh karena itu, tren partisipasi politik untuk Pemilihan Legislatif ini cenderung meningkat pada rentang waktu 2009-2024.

Pada Pemilihan Legislatif 2009, misalnya, tingkat partisipasi politik mencapai 70,99 persen dan mengalami peningkatan pada Pemilihan Legislatif 2014 menjadi 75,11 persen. Sedangkan, pada Pemilihan Legislatif 2019 sebesar 81,69 persen dan Pemilihan Legislatif 2024 terakhir justru mengalami penurunan, dan menjadi 81,42 persen. Pada proses elektoral 2024 terakhir, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif cenderung menurun.



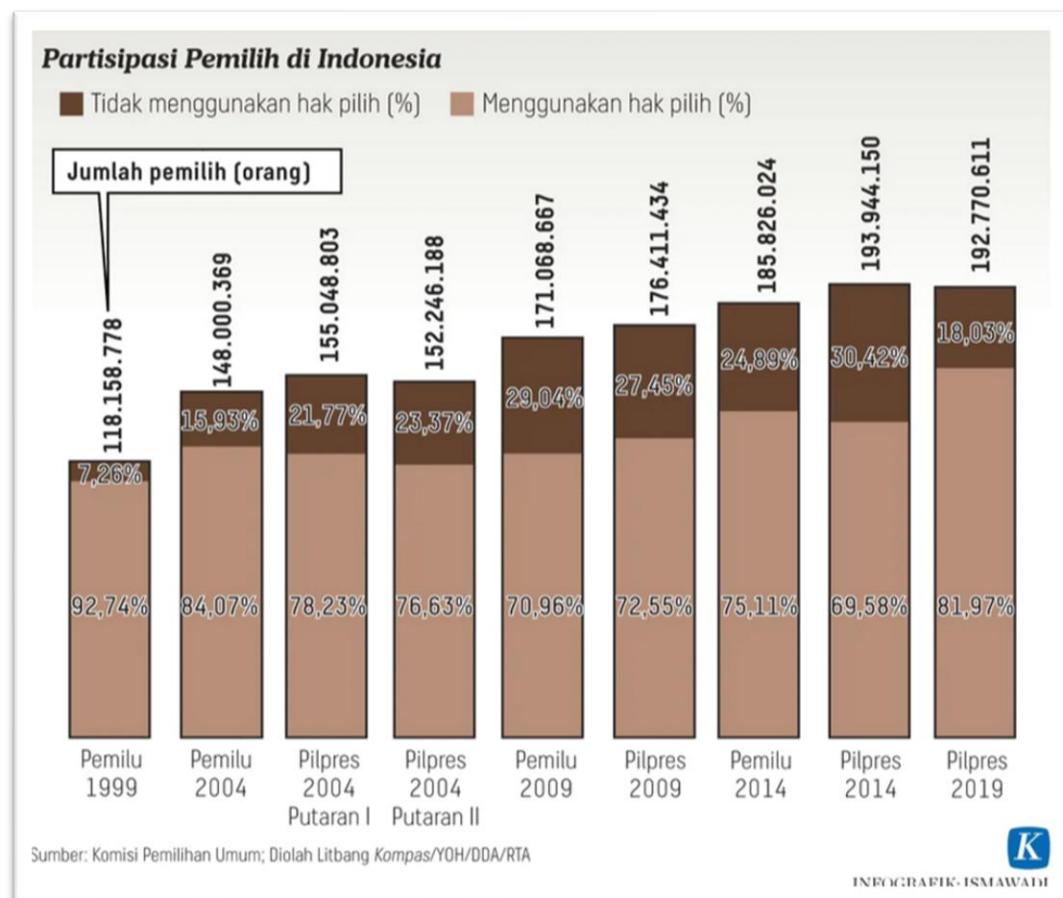
Sumber: (MEGA HENDARTO, 2024a).

Partisipasi publik dalam proses pemilu tentu di latar belakangi oleh adanya sosialisasi atau pemberian pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dan penyelenggara pemilu yang masif. Sebab, pemilih atau masyarakat seyogianya tidak secara simultan memperoleh informasi mengenai dinamika politik yang bertalian terhadap Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Tak ayal, jika tidak ada medium yang diberikan oleh penjaga gerbang demokrasi, seperti media massa maupun aktor lainnya, tidak menutup kemungkinan, tidak akan sampai informasi tersebut.

Sebagaimana yang terlihat pada pergelaran Pemilihan Kepala Daerah, di mana publik masih belum memiliki attensi secara penuh terhadap proses politik tersebut. Animo masyarakat yang masih rendah ini turut pula memengaruhi partisipasi dalam kontestasi politik. Dengan demikian, partai politik dan penyelenggara pemilu sudah semestinya memberikan edukasi secara konsisten. Rendahnya animo masyarakat dalam proses tersebut terbaca pada jajak pendapat *Kompas* pada pekan ketiga Agustus 2024. Hampir seperempat responden mengaku tidak pernah mengikuti pemberitaan terkait pilkada. Paling banyak, 57,2 persen responden, mengaku mengakses informasi seputar pilkada setidaknya seminggu sekali melalui berbagai kanal media (MEGA HENDARTO, 2024b). Setelah

kontestasi politik bergulir, tingkat partisipasi politik pemilih di Indonesia mengalami fluktasi. Kendati demikian, pada pergantian politik pada Pemilihan Presiden 2019 – tingkat partisipasi politik mencapai 81,97 persen. Capaian tersebut melewati perhelatan Pemilihan Presiden 2014 yang hanya mencapai 69,58 persen.

Gambar 4.1 Partisipasi Pemilih di Indonesia



Sumber: (YOGA PRASETYO, 2024)

Kemudian, dalam perspektif (Wasi, 2022b), misalnya, partai politik memiliki hak privilieze. Selain itu, partai politik juga secara kasat mata memiliki prestise yang tinggi. Bagaimana tidak? Ia sedari awal telah mempunyai sejumlah tupoksi yang dahsyat, terutama pendidikan politik. Sejak dua dasawarsa silam, perbincangan konsolidasi demokrasi di wilayah elite sangat konsisten dilakukan. Ruang-ruang publik penuh dengan pidato-pidato elite politik mengenai perkembangan konsolidasi demokrasi. Alih-alih hendak meningkatkan dan memperkuat demokrasi sampai ke aras lokal, justru tampak masih tertatih-tatih dalam prosesnya. Dalam hal ini, misalnya, komitmen yang dilakukan oleh partai politik, sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik juga amat rendah dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Hal ini dapat terkonfirmasi dari sejumlah kemandekan kegiatan edukasi politik yang ada di internal parpol sendiri. Di satu sisi, pendidikan politik tidak secara persisten dilakukan oleh partai politik atau lebih-lebih stagnan; baik secara internal maupun eksternal. Dalam kaitan tersebut, secara realitas politik dapat terilustrasikan pada saat mendekati proses elektoral. Seperti, kadang-kadang yang muncul juga bukan merupakan representasi dari partai politik atau kader dan anggota parpol, melainkan figur-firgur tersebut lahir dari proses saat memimpin daerahnya. Pun, bisa berasal dari profesi lainnya, seperti pengusaha maupun selebritis.

Tak hanya itu, memang partai politik akan mengalami kesukaran untuk menciptakan institusionalisasi partai politik yang kuat, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan roda organisasi yang bersifat modern ini. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya manusia (politik) yang memiliki kompetensi, termasuk *social intelligence*, diperlukan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Dalam sebuah studinya, (Ostrogorski, 2022) *Democracy and the Organization of Political Parties*, mengemukakan bahwa keterwakilan kepentingan-kepentingan individu telah hilang oleh semakin meningkatnya pengaruh dari mesin partai dan kontrol yang diberikan oleh sebuah kaukus dari tokoh-tokoh senior partai. Dalam literatur lainnya, misalnya, dapat ditelaah bahwa partai politik memiliki sejumlah peran dan tupoksinya masing-masing, di antaranya, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, peran dan tupoksinya secara internal. Kedua, peran dan tupoksi yang mengarah kepada khalayak publik (eksternal).

Sementara itu, *scope* yang pertama memainkan peranan yang sangat krusial dalam perkembangan konsolidasi demokrasi, termasuk penguatan institusionalisasi kepartaian, yakni, dapat memainkan peranan dalam hal pembinaan, pembekalan, menjaga dan merawat platform ideologi parpol, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dengan demikian, peranan dan tugas partai politik ini tidak dapat dinafikan dalam panggung politik. Secara umum, instrument tersebut saling melengkapi, bahkan berkelindan satu sama lainnya. Selain itu, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, kegiatan ini juga membutuhkan langkah yang kontinyu. Sebab, apabila kegiatan tersebut, salah satunya pendidikan politik yang telah dilakukan secara kontinyu, sudah barang tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan sumber daya manusia.

Tidak bisa dielakkan bahwa maju-mundurnya suatu organisasi tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan kohesivitas dan interaksi politik yang baik, diperlukan pemahaman bersama dalam mewujudkan misi dan visi partai politik. Di samping itu, pendidikan politik yang dilakukan parpol sangatlah substansial untuk menciptakan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas sumber daya manusia di internal parpol maupun di luar institusi partai politik.

Kemudian, pendidikan politik juga dapat berjalan secara maksimal, apabila didukung oleh kekuatan finansial partai politik. Karena, edukasi politik ini seharusnya dapat dilakukan secara konsisten dan persisten, agar *image* politik yang terekam dalam memori pemilih atau warga juga sangat kentara dengan nilai-nilai positif. Akibatnya, warga pemilih akan memberikan reward kepada parpol yang selalu bisa merawat basis dan/atau kepentingan masyarakat. Hal ini juga dapat tercermin dari platform ideologi partai politik.

Salah satu pertanyaan mendasar yang secara klise sudah sering dikemukakan perlu direfleksikan kembali oleh institusi modern seperti parpol, apakah pendidikan politik sangatlah penting? Dalam dunia politik kontemporer, pendidikan politik diperlukan untuk menciptakan stabilitas, menambah khazanah pengetahuan, memberikan keluasan dalam berpikir secara arif, jernih, dan bijaksana serta mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap kepentingan masyarakat secara komprehensif. Sementara itu, pendidikan politik juga dapat berdampak baik bagi para pengurus parpol, baik di tingkat nasional maupun daerah sampai ke tingkat ranting. Karena, dalam diskursus pendidikan politik, akan tercipta momentum untuk saling melengkapi satu sama lain demi mewujudkan misi kepartaian.

Pasalnya, akan terjadi interaksi sosio-politik yang selama ini absen dalam pentas politik di Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan lainnya ketika melaksanakan pendidikan politik ini juga dapat melahirkan strategi dan taktik politik yang bisa bersifat sistemik. Strategi dan taktik politik ini juga bisa terkristalisasi menjadi beberapa elemen, seperti, mempelajari komunikasi politik, menyusun strategi dalam membuat konsensus atau dalam istilah lain dikenal sebagai strategi lobi politik, dan dapat membuat, mengidentifikasi, membaca, dan mengetahui isu-isu politik yang bersifat aktual. Hal ini sangatlah substantial dalam mewujudkan kualitas partai politik.

Kelebihan dalam menerapkan pendidikan politik juga bisa melatih para anggota maupun kader partai politik dalam memahami peta politik, termasuk melatih mentalitas yang sesuai dengan platform ideologi parpol masing-masing. Sampai saat ini, khalayak publik juga dibuat bingung karena parpol tidak mampu memaksimalkan peranan ideologi parpolnya, sehingga dalam persepsi masyarakat, parpol satu dengan parpol lainnya tidak ada bedanya. Padahal, platform ideologi begitu sangat penting, karena sebagai rule model dalam melaksanakan kinerja-kinerja parpol. Alhasil, apabila pendidikan politik dilakukan secara sistemik, maka akan melahirkan pemimpin yang cakap.

Namun demikian, secara realitas politik kontemporer, parpol masih terseok-seok dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai institusi modern. Alih-alih hendak membangun konsolidasi demokrasi, justru pendidikan politik pun bersifat stagnan, terlebih tampak mengalami regresi secara politik. Akibatnya, absennya pendidikan politik, juga mengafirmasi bahwa ideologi politik tidak diterapkan dan kepercayaan publik terhadap parpol yang semakin menurun. Meskipun, saat ini,

mungkin ada sebagian yang melaksanakan pendidikan politik melalui sekolah kepartaian maupun metode lainnya. Akan tetapi, belum berjalan maksimal dan hanya bergulat di internal parpol semata.

Dalam kaitan tersebut, meminjam istilah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mendedahkan bahwa pendidikan politik juga diperlukan untuk proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, dalam Pasal 34 (3b) diilustrasikan bahwa Pendidikan politik ini berkaitan dengan sejumlah hal ihwal, seperti pendalaman empat pilar, membangun etika dan budaya politik, serta kaderisasi dalam institusi modern yang dapat dilakukan secara sistemik. Pada saat yang bersamaan, negara juga turut memberikan concern terhadap organisasi yang bersifat modern ini dengan memberikan subsidi keuangan bagi partai politik melalui mekanisme bantuan dari APBN/APBD sesuai perolehan kursi dan perolehan suara.

Harapan publik terhadap parpol masih membubung tinggi karena parpol sebagai sebuah entitas modern yang bisa melahirkan pemimpin masa depan. Akibat dari kaderisasi yang telah dijalankan oleh partai politik. Dan, parpol juga bisa mengerek elektabilitasnya melalui pendidikan politik serta dapat mengisolasi tokoh sentral dalam partai politik. Artinya, di masa yang akan datang, parpol tidak tergantung pada figur utama tertentu, seperti yang dapat dilihat saat ini. Karena, di masa yang akan datang, sumber daya politik para anggota dan kader juga tinggi. Karena, figur utama yang mendominasi parpol ada batasnya, beda halnya dengan partai politik. Sekali lagi, maju-mundurnya sebuah organisasi, dalam hal ini parpol, tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Terakhir, peranan ini dapat berjalan maksimal apabila didukung oleh kekuatan sumber daya manusia, sumber daya jaringan, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi. Kemudian, belum maksimalnya pendidikan politik yang belum maksimal karena masih absennya entitas politik dalam memberikan edukasi secara sistemik. Padahal, pendidikan politik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menumbuhkan pemahaman publik mengenai perilaku dan keputusan politik, terutama bagi para pemilih pemula. Sebab, pendidikan politik memiliki tujuan yang baik, yakni mendorong merekamenciptakan lingkungan kehidupan yang sehat dan demokratis di masyarakat, bangsa, dan negara (Handoyo & Lestari, 2017b).

Di samping itu, pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemilih untuk memilih kandidat yang mereka pilih dalam pemilihan umum. Pemilih pemula dapat menggunakan pendidikan politik sebagai tolok ukur untuk menentukan keterwakilan politik mereka. Dengan melakukannya, mereka paling tidak akan tahu bagaimana menghindari terjebak dalam mobilisasi kepentingan politik yang cenderung subjektif dan menguntungkan segelintir pihak (Firmansyah & Kariyani, 2021).

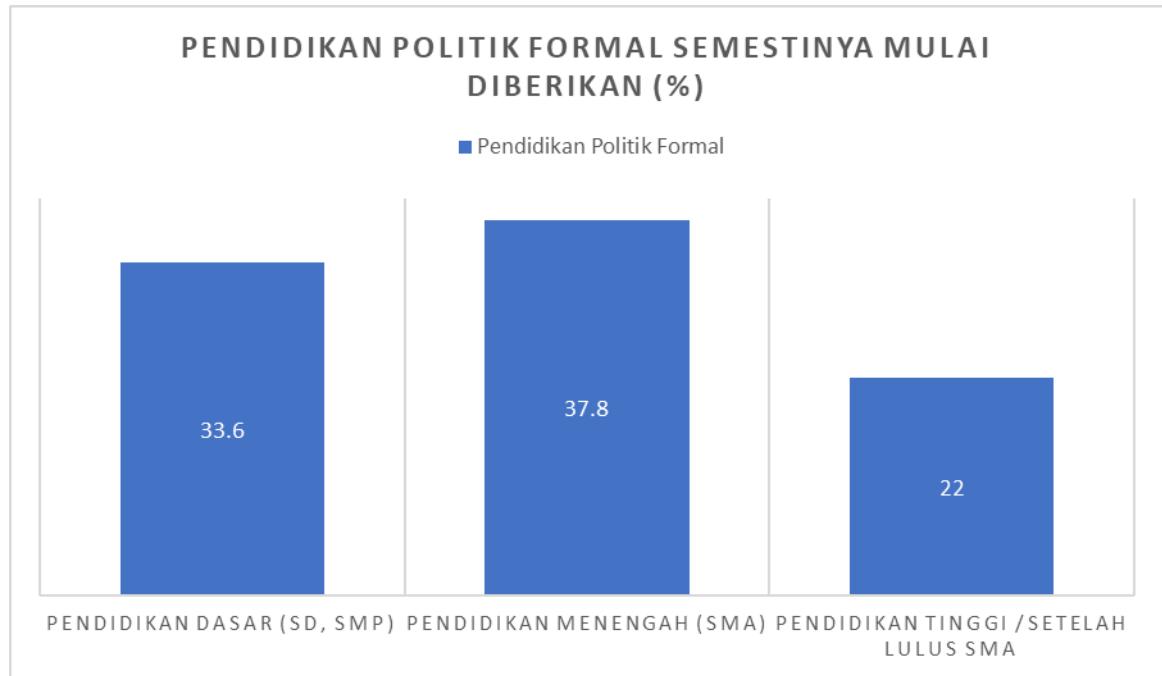
Pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik maupun entitas politik terhadap masyarakat tentu sangatlah penting di tengah proses konsolidasi

demokrasi pasca-reformasi. Sebab, setelah reformasi bergulir – pemilih memiliki kewenangannya untuk menentukan pemimpin yang akan mereka pilih sebagai pemimpinnya. Dalam konteks ini, pendidikan politik masyarakat di Indonesia dalam proses elektoral masih memiliki pekerjaan rumah. Hal tersebut terekam di ruang publik, di mana kedekatan warga dengan partai politik (*party id*) relatif tidak kuat.

Party ID atau *party identification* merupakan sebuah konsep yang memiliki kedekatan dan kesukaan pemilih terhadap partai politik yang dipilihnya dalam pemilu. Kendati demikian, masih ditemukan beragam masalah di tengah proses elektoral di Indonesia, seperti politik uang, di mana pemilih cenderung permisif terhadap praktik politik tersebut. Dengan demikian, pendidikan politik sangat penting bagi para pemilih, termasuk pemilih pemula yang baru bisa menentukan pilihannya pada proses elektoral – baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

Pendidikan politik yang dinilai penting ini juga terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang telah dilakukan pada 16-18 Oktober 2023. Sebanyak 88,3 persen responden menyatakan pendidikan politik krusial untuk diusahakan sebagai bagian penguatan demokrasi. Bahkan, 30,2 persen dari angka tersebut menilai pendidikan politik sangat penting (GITIYARKO, 2023). Namun, ada yang menilai bahwa pendidikan politik di Indonesia sudah berlangsung lancar sebanyak 31,7 persen dan yang menilai belum lancar sebesar 52,1 persen dan ada yang menilai tidak berjalan lancar sebesar 4,6 persen. Secara akumulasi, pendidikan politik di Indonesia masih belum lancar sebagaimana yang terilustrasi dari hasil jajak pendapat tersebut sebesar 52,1 persen.

Pada saat yang sama, para responden juga menilai bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara formal seyogianya diberikan saat mereka menempuh pendidikan, baik pendidikan dasar (SD, SMP), Pendidikan menengah (SMA), dan Pendidikan tinggi/setelah lulus SMA.



Sumber: (GITIYARKO, 2023).

Dalam hal ini, terlihat bahwa semestinya pendidikan politik diberikan saat pemilih berada dalam ruang pendidikan, baik sejak sekolah dasar seperti SD maupun SMP, juga jenjang pendidikan SMA karena mereka berpotensi menjadi pemilih pemula pada pemilihan umum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini akan berfokus terhadap permasalahan tersebut.

Pendidikan politik tentu memiliki prospek yang baik, karena menghindari pemilih dari praktik politik uang, menangkal atau memfilterisasi informasi seputar politik dan pemerintahan, dan menciptakan pemilu yang lebih aman dan demokratis. Saat ini, baik partai politik, politisi, maupun KPU dan Kementerian masih belum maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik sangatlah substansial bagi publik, agar kualitas pemilihan umum bisa sesuai dengan harapan publik, tercipta secara *fair* dan demokratis.

Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem politik demokratis, partai politik menjadi suatu entitas politik yang tidak bisa disangkal peranannya. Sebab, partai politik memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang substansial dalam rangka mendorong dan menciptakan kepentingan publik, terlebih partai politik memiliki stereotipe sebagai penyalur artikulasi dan membawa agregasi kepentingan publik (Agustino, 2020). Kehadiran partai politik ini tentunya sebagai instrumen politik untuk mengkoneksikan berbagai kepentingan publik melalui proses politik, terlebih partai politik menghadirkan anggota dan kader partai politik di lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Pada dasarnya, partai politik sangat dibutuhkan untuk membawa kepentingan publik. Oleh karena itu, peranannya sangat signifikan dalam sistem politik modern. Tak ayal, kandidat yang akan berlaga cenderung memilih untuk

menjadi anggota atau pengurus dari partai politik. Pada saat yang sama, munculnya partai politik semestinya diikuti dengan kualitas kelembagaanya. Karena itu, demokrasi bisa semakin membaik jika partai politik memerhatikan kondisi kelembagaanya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Samuel P. Huntington bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi, melembaga dalam masyarakat, menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik (Huntington, 1968). Sementara itu, Soltau menjelaskan bahwa *“a group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies”* (Soltau, 1961).

Dalam konteks ini, partai politik dinilai sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki kekuasaan untuk menghadirkan elite politik baik di tingkat nasional maupun regional, dan lokal. Meski demikian, pilar demokrasi lainnya juga turut menguatkan pembangunan konsolidasi demokrasi, seperti lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pemilihan umum, dan media massa. Dengan demikian, kehadiran partai politik tidak sekadar dipandang dari aspek kuantitas semata, melainkan harus mampu melaksanakan fungsinya dan terlibat dalam pemilihan umum (Edison Muchlis M. (ed), 2007).

Munculnya keberadaan partai politik sebagai suatu entitas publik dalam konteks pelembagaan dirinya terdiri atas tiga dasar. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga partai politik adalah saluran utama memelihara akuntabilitas demokratis (IMD, 2006). Sebagai lembaga politik – partai politik seyogianya menjadi organisasi politik yang lebih terlembaga, terlebih anggota dan kadernya akan turut memimpin lembaga pemerintahan melalui serangkaian kontestasi politik, baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Argumen lainnya datang dari Friedrich yang memahami partai politik sebagai:

.... is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages (Friedrich, 1967).

Sedangkan, dalam perspektif Giovani Sartori (1967), dijelaskan bahwa partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemerintahan umum dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Budiardjo, 2008). Selain itu, menurut Heywood (2014:392), partai politik adalah sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan, melalui sarana pemilihan atau yang lain. Lebih lanjut, Heywood mengemukakan bahwa partai politik memiliki sejumlah fungsi-fungsi utama, misalnya, perwakilan, pembentukan dan rekrutmen

elite, perumusan tujuan, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi serta pengorganisasian pemerintahan (Heywood, 2014)

Kemudian, partai politik bukan sebuah entitas yang bersifat tunggal dan homogen, terlebih dalam praktiknya di Indonesia, yang menerapkan sistem presidensial di satu pihak, dan sistem multi-partai di pihak yang lain. Oleh karena itu, dalam sistem multi-partai ini justru sangat terlihat secara eksplisit bahwa terdapat perbedaan yang dimiliki oleh seluruh anggota atau fungsionaris partai politik (Wasi, 2022a). Hal ini terekam karena terlihat sangat banyak dan bervariasi para anggota dan kader yang menjadi pengurus di internal partai politik yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga, bisa memengaruhi pola dan perilaku antaranggota maupun antarkader, terutama yang berkelindan terhadap keputusan politik.

Dalam hal ini, partai politik terdiri atas beragam kepentingan yang disatukan oleh platform ideologi partai politik dan kehadiran partai politik di tengah-tengah *plurality, difference, dan diversity* perlu dijadikan sebagai mata rantai untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara-bangsa, bukan sebaliknya, dijadikan sebagai alat politik untuk mengancam keutuhan negara (Wasi, 2020). Secara umum, partai politik di Indonesia yang menganut sistem multi-partai ini membuat entitas politik cenderung absen dalam mengaktualisasikan *platform* ideologinya dan cendrung pragmatis terhadap dinamika politik domestik. Sebagai ilustrasi, misalnya, partai politik juga sering mendorong kandidat yang bukan berasal dari internalnya. Hal ini mengonfirmasi bahwa proses pendidikan politik di internal partai politik tidak berjalan atau stagnan. Bahkan, hal ini sangat sukar diterapkan mekanisme pemberian pendidikan publik kepada masyarakat, sedangkan para anggota dan kader partai politik saja masih belum menerima proses pendidikan politik terebut secara komprehensif.

Alih-alih akan menciptakan dan mendorong fungsinya agar lebih baik, justru partai politik terjerembab pada memudarnya kualitas fungsi politik tersebut, misalnya, absennya partai politik saat tidak berpihak kepada masyarakat saat keputusan politik yang diciptakan oleh pemerintah dinilai mengancam kepentingan publik. Hal tersebut karena partai politik terjebak pada pembangunan koalisi politik di tengah sistem multi-partai dan pada saat yang bersamaan di tengah sistem presidensial. Dalam bahasa lain, hal ini akan menciptakan jalan buntu politik. Dengan demikian, di tengah sistem politik modern, seharusnya partai politik sudah harus berbenah agar pendidikan politik kepada masyarakat semakin membaik sekaligus mengikis fenomena politik yang merugikan semua pihak, baik politik uang maupun iwhal lainnya.

Selain itu, partai politik merupakan sumber hidup (*life blood*) dari politik modern (Axford, Barrie Browning, Garry K in Barrie Axford, 2002). Tak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik (Joko J Prihatmoko., 2003). Hal Ini menjadi aksioma dalam ilmu politik, bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik, sebab kehadiran partai politik berarti ada

pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat (Imawan, 1996).

2.1.1 Fungsi Partai Politik

Sebagai entitas politik yang memiliki peranan signifikan, partai politik tentu memiliki preferensi tugas, pokok, dan fungsinya sebagai instrumen politik. Dalam konteks tersebut, partai politik dalam iklim sistem politik modern tentu perlu menciptakan kelembagaan yang ideal, agar bisa melakukan perannya secara konsisten dan persisten.

Meminjam istilah La Palombara dan Weiner, partai politik yang ideal mencakup empat hal, pertama, partai politik yang memiliki basis massa memadai dan hubungan atau jaringan luas di berbagai daerah atau dengan kata lain berakar di masyarakat. Kedua, partai politik tersebut melakukan kegiatan yang berkesinambungan, baik untuk mengontrol kekuasaan, menyuarakan aspirasi politik masyarakat, maupun dalam mengusulkan suatu kebijakan. Ketiga, berupaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai bagian utama dari upaya mewujudkan tujuan dan kepentingannya, dan yang terakhir partai politik tersebut ikut serta dalam pemilu dan menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan dan jabatan publik (Surbakti, 1998)

Oleh karena itu, dalam perspektif Budiardjo, partai politik memiliki empat fungsi, di antaranya: partai politik sebagai sarana komunikasi politik; partai politik sebagai sarana sosialisasi politik; partai politik sebagai sarana rekrutmen politik; dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik dimaknai sebagai sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, untuk kemudian diperjuangkan melalui wakilnya yang berada di lembaga legislatif kepada pemerintah terkait dengan kebijakan publik, dan sebaliknya, partai politik juga berfungsi untuk mendeseminasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dinilai lebih mengarah kepada fungsi untuk mensosialisasikan sistem politik maupun fenomena politik kepada masyarakat. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yakni partai politik dapat merekrut masyarakat untuk diajukan kader dan diusung dalam proses politik seperti pemilihan umum, dan yang keempat yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik di mana partai politik bisa menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintah (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat peran partai politik sangat esensial di tengah masih belum terlembaganya dalam sistem politik mutakhir di Indonesia. Di samping itu, dalam pandangan Surbakti, misalnya, partai politik memiliki fungsi yang terdiri atas sosialisasi politik, rekrutmen politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, partisipasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik (Surbakti, 1992). Tak hanya itu, fungsi partai politik tampaknya sangat kompleks

pula, seperti yang telah diuraikan oleh Macridis yang mencakup representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi politik yang meliputi paritisipasi, sosialisasi, mobilisasi politik, kemudian ada juga persuasi, represi, rekrutmen politik, pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintahan (Macridis, 1983) dalam studi (Amal, 1996).

Sementara itu, dalam perspektif Palmer menyebutkan tiga fungsi pokok partai politik di negara berkembang, yaitu (1) menyediakan dukungan massa yang stabil, (2) sarana integrasi dan mobilisasi, serta (3) memelihara kelangsungan kehidupan politik (Cipto, 1996). Di sisi lima fungsi dasar dari keberadaan partai politik, yaitu (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik (Putra, 2003).

2.2 Pendidikan Politik

Meminjam istilah Khoiron yang menyatakan bahwa pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau *politische bildung*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan *bildung* terkandung sebuah makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penung tanggung jawab untuk menjadi insan politik (Khoiron, 1999).

Di samping itu, menurut R. Hager (Kartono, 1989) memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Sementara itu, politik dipahami sebagai proses menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, Ruslan memaknai pendidikan politik sebagai upaya upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik (Ruslan, 2000).

Pada saat yang sama, pendidikan politik juga dimaknai sebagai suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang relatif stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi (Brownhill & Smart., 1989).

Pemilih memiliki haknya untuk menerima pendidikan secara sistemik dari seluruh pihak, termasuk dari masyarakat sipil dalam rangka menciptakan pendidikan politik yang lebih demokratis. Sebab, pendidikan merupakan upaya yang sadar yang dilakukan sebagai proses dan upaya manusia berdaya guna dalam rangka menciptakan generasi yang bermanfaat dan bermartabat (Jumani, 2013). Oleh karena itu, dalam konteks politik – pemilih dan masyarakat sudah semestinya memperoleh pendidikan dari para unsur yang terlibat di arena politik melalui proses elektoral seperti Pemilihan Umum, agar masyarakat atau pemilih memahumi proses pengambilan keputusan dan transisi kepemimpinan nasional maupun regional, bukan justru dihadapkan pada permasalahan yang besar, seperti konflik. Jadi, masyarakat harus diberikan edukasi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan politiknya pada kontestasi politik, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Karena itu, politik selalu bertalian terhadap kekuasaan para aktor yang bisa mengambil keputusan untuk masyarakat secara luas. Selain itu, para aktor politik turut memiliki kuasa politik pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif (Prayogo & Wardhani, 2022). Dalam bahasa lain, pendidikan terhadap sirkulasi kepemimpinan atau politik melalui proses pemilihan umum perlu dijadikan sebagai instrumen utama untuk mendorong peningkatan kualitas pemilih, agar pemilih cenderung rasional atas pilihan politiknya, bukan berdasarkan pada praktik yang kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran entitas sosial maupun entitas politik dalam memberikan edukasi secara gradual kepada masyarakat bisa membawa implikasi terhadap peningkatan kualitas pemilih dan kontestasi elektoral di Indonesia. Akibatnya, konsolidasi demokrasi bisa terwujud secara utuh sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam politik praktis.

Kemunculan partai politik di Indonesia menawarkan alternatif kepada publik bahwa partai politik bisa menjadi sarana utama untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap kepentingan masyarakat, terlebih secara inheren partai politik merepresentasikan anggota dan kadernya menjadi anggota parlemen, kepala daerah, maupun presiden. Alhasil, signifikansi kehadirannya sangat baik dalam sistem politik mutakhir. Oleh karena itu, partai politik perlu menciptakan kelembagaan yang demokratis. Di samping itu, peranan masyarakat sipil dalam memberikan edukasi politik kepada publik juga tidak bisa dinafikan. Secara faktual, saat ini banyak komunitas atau lembaga *think tank* yang bergerak di sektor komunitas politik. Biasanya, komunitas politik ini selalu memberikan pemahaman melalui mekanisme politik yang mereka lakukan, seperti pendekatan melalui kegiatan *Focus Group Discussion*, seminar, menampilkan informasi terkini melalui kanal-kanal media sosial dan lainnya.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadi Saputro, 2021).

Atas dasar tersebut, sudah seyogianya partai politik mengaktualisasikan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, karena partai politik pada saat yang bersamaan memperoleh pendanaan melalui APBN maupun APBD. Meski demikian, dalam praktiknya, partai politik tampak masih tertatih-tatih dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut, sebagaimana yang telah terekam dalam jajak pendapat Litbang *Kompas* di atas. Akhirnya, masyarakat belum memiliki kesadaran yang genuine dalam proses politik, terutama saat pemilihan umum digelar. Hal ini teraffirmasi dari adanya praktik politik uang saat pergelaran politik, baik nasional maupun regional.

Menilik ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik menentukan bahwa negara hanya bersifat memfasilitasi. Fasilitas yang diberikan negara terhadap partai politik tentu seperti yang telah disebut di awal, yaitu pemberian APBN maupun APBD terhadap partai politik, yang digunakan untuk keperluan partai politik, salah satunya ialah pendidikan politik. Kendati demikian, program-program pendidikan politik dilakukan para agen politik (Mahgfiroh, 2017).

Saat ini, merujuk pada jajak pendapat Litbang *Kompas* di atas, pendidikan politik terhadap masyarakat, terutama pemilih pemula harus diberikan saat mereka menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai menengah pertama maupun menengah atas dan setelahnya, agar proses pendidikan politik tidak terputus. Sehingga, menciptakan koneksi politik yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik dinilai sangat penting bagi masyarakat. Namun, realitas politik menunjukkan justru masih belum maksimalnya pemberian pendidikan politik yang dilakukan partai politik. Oleh karena itu, kehadiran masyarakat sipil dalam memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula tentu dinilai baik, karena bisa memberikan pemahaman secara ekstensif kepada pemilih atau masyarakat.

Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan juga berdasarkan pada Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih (Hasyim & Shafa Salsabila Azkia, 2023).

KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan di awal menggambarkan bahwa pendidikan politik masih absen dalam memberikan edukasi kepada khalayak publik. Pasalnya, masih terdapat para pemilih pemula yang belum memahami yang bertalian dengan politik. Secara realitas politik mutakhir, terutama saat proses elektoral yang digelar secara serentak ini menimbulkan ketidakpahaman publik terhadap proses politik, terutama diselenggarakan secara serentak. Dengan demikian, diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk meningkatkan pendidikan politik. Hal tersebut bukan sekadar dilakukan oleh partai politik semata, melainkan oleh entitas sosial lainnya seperti akademisi, mahasiswa, keluarga, dan seterusnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula.

Kemudian, pendidikan politik ini bisa berimbas pada pemahaman publik terhadap pengetahuan politik, terutama yang bisa dimahami oleh pemilih pemula yang memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan. Oleh karena itu, meningkatnya pendidikan politik juga berimplikasi terhadap partisipasi politik. Sebab, partisipasi politik pemilih dalam arena politik Pemilihan Presiden mengalami fluktuasi, terutama terjadi pada tahun 2014 sebesar 69,58 persen. Sebelumnya, pada Pemilihan Presiden 2009, tingkat partisipasi politik sebesar 72,55 persen. Setelah itu, indeks partisipasi politik selalu mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2019 sebesar 81,97 persen, dan pada Pemilihan Presiden 2024 mengalami penurunan, hanya mencapai 81,78 persen.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Para penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang Kota Serang dan seluruh tenaga pendidik di lingkungan pendidikan SMKN 1 Kota Serang yang telah bersedia menjadi lokus pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Amal, I. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke depan. *Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology)*, 1(1), 389–403. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>

Anshori, A., & Izharysyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>

Axford, Barrie Browning, Garry K in Barrie Axford, et al. (2002). Introduction. In *Politics*. New York: Routledge.

Azirah. (2019). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI. *Politica*, 6(2), 86–100. <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/14602/7844>

Brownhill, R., & Smart., P. (1989). *Political Education*. London: Routledge.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cipto, B. (1996). *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

EdIson Muchlis M. (ed). (2007). *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press.

Elen Pitria, Della Utari, Yesi Marseta, Moneka Tiara Sari, & Rizky Ayomi Pangestu. (2023). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(3), 210–218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>

Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>

Fatmarina, N., Rini, A. S., & PS, M. (2019). Literasi Internet dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Pulau Pramuka. *Prosiding Comnews 2019*, 1(1), 57–67. <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1080>

Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4).

Friedrich, C. J. (1967). *Constitutional Goverment and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham: Blaisdell.

GITIYARKO, V. (2023). *Dilema Pendidikan Politik di Indonesia*. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/15/dilema-pendidikan-politik-di-indonesia?open_from=Search_Result_Page

Hadi Karyono, Kunarto, Saryana, Purwanto, Krismiyarsi, & Mahmudah P. F. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(3), 87–92. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i3.1238>

Hadi Saputro, R. (2021). Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 147–157.

Handoyo, E., & Lestari, P. (2017a). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Handoyo, E., & Lestari, P. (2017b). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.

Hasyim, A., & Shafa Salsabila Azkia, S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187–200.

Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Chancing Society*. New Haven: Yale University Press.

Imawan, R. (1996). *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

IMD. (2006). *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis. Terjemahan*. Jakarta: NIMD.

Indrawan, J., & Yuliantri, P. (2023). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 4(1), 184–196. <https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v4i1.29172>

Joko J Prihatmoko. (2003). *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, LP3M Unwahas.

Jumani. (2013). Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum. *Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan*, 180–195.

Kartono, K. (1989). *Pendidikan Politik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju.

Khoiron, M. N. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta: LKIS.

Macridis, R. . (1983). *Contemporary Political Ideologies: Movement and Regimes*. Toronto: Little Brown and Company.

Mahgfiroh, F. (2017). Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Smp Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, (1), 357–368.

MEGA HENDARTO, Y. (2024a). *Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih*. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih?open_from=Search_Result_Page

MEGA HENDARTO, Y. (2024b). *Publik Belum Antusias Hadapi Pilkada*. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/23/publik-belum-antusias-hadapi-pilkada?open_from=Search_Result_Page

Nurfaisal, M. D., & Sari, I. (2025). Runtuhnya Dominasi Keluarga Ratu Atau dalam Pilkada Banten 2024: Analisis Dinamika Politik Lokal. *Ensiklopedia Of Journal*, 7(1), 133–140. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/2793/pdf>

Ostrogorski, M. (2022). Democracy and the Organization of Political Parties. In *Perspectives on Political Parties* (pp. 251–261). New York: Palgrave Macmillan.

Prayogo, D. V, & Wardhani, N. W. (2022). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 25–30.

Putra, F. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruslan, U. A. M. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin. Terjemahan Jasiman, dkk*. Solo: Era Intermedia.

Soltau, R. F. (1961). *An Introduction to Politics*. New York: Longman, Green & Co.

Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z di Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5918–5922. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13306>

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Granesia.

Surbakti, R. (1998). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Sutrisman, D. (2020). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.

Wasi, I. (2020). *Politik, Partai Politik, dan Perempuan: Frontstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Wasi, I. (2022a). *Konsolidasi Demokrasi: Sebuah Telaah Politik Pasca-Reformasi dari Politik Lokal hingga Politik Nasional*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Wasi, I. (2022b). Stagnasi dan Regresi Pendidikan Politik. *Artikel*. Retrieved from <https://www.indonesiana.id/read/152821/stagnasi-dan-regresi-pendidikan-politik>

YOGA PRASETYO, A. (2024). *Relasi Hitung Cepat dan Partisipasi Politik*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/15/relasi-hitung-cepat-dan-partisipasi-politik>